

Efektivitas Publikasi Kegiatan Pemerintah pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung

I Gede Guntur Pradnyana Jaya

Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Ngurah Rai

e-mail: gunturpradnyanajaya@gmail.com

Abstrak

Peran humas dalam hal ini yaitu menjalin hubungan dengan pihak eksternal dalam berkomunikasi dan bertukar informasi dengan efektif agar segala informasi dapat diterima dan dijalankan dengan baik. Peran humas berkaitan dengan pencarian suatu informasi dengan kemampuan untuk mempengaruhi, mendokumentasikan suatu kegiatan pemerintahan, serta pembuatan suatu berita kemampuan untuk mengobservasi dan menjabarkan suatu masalah sesuai dengan fakta yang lapangan yang nantinya akan diunggah ke media sosial. Tujuan penelitian ini merupakan untuk mengetahui efektivitas dan hambatan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Badung terkait mempublikasikan kegiatan pemerintahan di Kabupaten Badung, dengan menggunakan suatu pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data dengan wawancara dengan melakukan analisis kemudian menyajikan kesimpulannya. Hasil penelitian ditemukan beberapa kendala serta faktor yang mempengaruhinya terkait publikasi atau rilis berita oleh media konvensional atau cetak yang melebihi batas waktu pengiriman ke media cetak bersangkutan selain itu dalam hal media online yaitu terhadap internet yang sering putus. Dimana upaya untuk menghadapi hambatan tersebut dengan komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan dalam organisasi serta pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu, serta peningkatan sarana dan prasarana terhadap liputan yang harus dilakukan dengan live streaming.

Kata kunci: *Implementasi Kebijakan, Kegiatan Pemerintahan, Humas.*

Abstract

The role of public relations in this case is to establish relationships with external parties in communicating and exchanging information effectively so that all information can be received and carried out properly. The role of public relations is related to the search for information with the ability to influence, document a government activity, and make a news the ability to observe and describe a problem in accordance with facts in the field which will later be uploaded to social media. The purpose of this study is to determine the effectiveness and obstacles of the Protocol and Communication Section of the Head of the Badung Regional Secretariat related to promoting government activities in Badung Regency, using a

qualitative approach by collecting data with interviews by conducting analysis and then presenting conclusions. The results of the study found several obstacles and factors that influence it related to publication or news release by conventional media or Print that exceeds the deadline for sending to the relevant print media in addition to online media, namely the internet which is often broken. Where efforts to overcome these obstacles with good communication between superiors and subordinates in the organization and the implementation of ideas, planning and execution of an activity within a period of time, as well as improving facilities and infrastructure for coverage that must be done by live streaming.

Keywords : *Policy Implementation, Government Activities, Public Relations.*

PENDAHULUAN

Kegiatan humas adalah kegiatan memberikan informasi baik intern maupun ekstern yang mana arti humas itu sendiri adalah perantara pimpinan organisasi dengan bawahan dan masyarakat, baik dalam membina hubungan masyarakat internal maupun eksternal sebagai staf humas berhak mengetahui rencana kebijaksanaan, aktivitas program kerja, dan rencana rencana usaha suatu perusahaan berdasarkan keinginan publik. Pelaksanaan peran oleh humas tersebut tentu harus dijalankan dengan efektif. Efektivitas dalam suatu tatanan kerja serta komunikasi dalam institusi sangatlah penting karena efektivitas merupakan sebuah unsur yang menjadi harapan setiap institusi dalam melakukan aktivitasnya. Publikasi adalah suatu informasi yang bernilai dengan maksud untuk menambah perhatian kepada suatu tempat, orang atau sebab yang biasanya dimuat dalam suatu media cetakan atau penerbitan dan selalu menyangkut kepentingan publikasi yang dapat berbentuk berita, laporan dan opini. Sehingga, hubungan kerjasama Humas dan Media (media relations) ini harus menciptakan komunikasi yang baik agar kerjasama dapat terjalin dengan baik sehingga tujuan dari institusi tersebut dapat tercapai sesuai keinginan dan informasi atau berita yang disebarluaskan akurat dan dapat tersampaikan dengan baik. Secara ringkas, bahwa peran humas dalam hal ini yaitu menjalin hubungan dengan pihak eksternal dalam berkomunikasi dan bertukar informasi dengan efektif agar segala informasi dapat diterima dan dijalankan dengan baik.

Fungsi paling dasar humas dalam pemerintahan dalam hal pelaksanaan peran sebagai suatu kegiatan publikasi adalah membantu menjabarkan dan mencapai tujuan program pemerintahan, meningkatkan sikap responsif pemerintah, serta memberi publik informasi yang cukup untuk dapat melakukan pengaturan diri sendiri (Lattimore, 2010). Kegiatan publikasi tersebut sebenarnya terdapat beberapa peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan publikasi oleh humas pemerintahan yaitu melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang dalam hal ini berkaitan dengan adanya kegiatan publikasi kepada masyarakat dan dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai suatu pelaksanaan hak masyarakat dalam keterbukaan informasi khususnya kegiatan pemerintah melalui publikasi, yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi, Peraturan Bupati Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Sekretariat Daerah dengan

pengimplementasian melalui Keputusan Bupati Kabupaten Badung Nomor 113/049/HK/2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Badung.

Dalam lingkup pemerintahan, humas memegang peranan yang sangat penting dan strategis, sebagai jembatan untuk membangun suasana yang kondusif dalam kerangka 'win-win solutions', antar berbagai stakeholders organisasi, baik internal maupun eksternal dalam rangka membangun citra dari institusi pemerintah itu sendiri. Tujuan peran daripada Humas pemerintah adalah dalam memberikan sanggahan mengenai pemberitaan yang salah dan merugikan pemerintah, dan mengkomunikasikan atau menginformasikan berbagai kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk membentuk citra positif pemerintah daerah tersebut dimata publiknya. Total press release per-tahun 2021 sebanyak 4.140 (Sumber: Bagian Prokompim Setda Badung). Dari data yang ditemui bahwa perharinya berita atau press release bisa mencapai 14 berita per-harinya dan disebarluaskan oleh media relations baik media cetak maupun online. Berdasarkan data tersebut, sebenarnya pelaksanaan peran humas pemerintahan dalam hal ini diharapkan dapat menjadi tameng pemerintah dalam membentuk citra positif pemerintahan. Sehingga dalam hal ini, khususnya di Pemerintahan Kabupaten Badung dengan jumlah humas dan petugas yang terdapat dalam pemerintahan Kabupaten Badung dalam mempublikasikan berita membuat bagian humas harus lebih sabar, teliti, aktif dan kreatif. Pembentukan citra terhadap pemerintahan tersebut agar dapat berjalan teliti, sabar, aktif, dan kreatif, maka sebenarnya humas pemerintah harus bekerja dengan suatu keefektifan.

Didalam melaksanakan kegiatan publikasi, Humas Prokompim turun langsung mengikuti kegiatan pemerintahan, kemudian membuat dokumentasi dan membuat berita yang nantinya akan di bagikan melalui akun media sosial. Dapat dikatakan dalam hal ini sebenarnya kegiatan publikasi oleh Humas Prokompim tersebut tidak menjamin suatu keefektifan serta keakuratan data dikarenakan bagian humas Prokompim yang bertugas tersebut selain memiliki tugas dalam kegiatan pemerintah, mereka dibebankan tugas lebih berkaitan dengan kegiatan publikasi seperti dokumentasi serta pembuatan berita untuk dipublikasikan ke media sosial. . Hal ini sebenarnya yang membuat berjalannya peran Humas Prokompim tersebut dikatakan adanya suatu permasalahan yang menjadikan kinerja humas pemerintah belum efektif karena terdapat suatu kesenjangan diantara standar pelaksanaan humas tersebut terhadap implementasi yang berada pada lapangan terkait dengan penugasan tersebut seharusnya terdapat beberapa kelompok atau team yang terbagi berkaitan dengan pencarian suatu informasi dengan kemampuan untuk mempengaruhi, mendokumentasikan suatu kegiatan pemerintahan, serta pembuatan suatu berita kemampuan untuk mengobservasi dan menjabarkan suatu masalah sesuai dengan fakta yang di lapangan yang nantinya akan diunggah ke media sosial dengan dalam waktu yang ditentukan, sehingga Humas Prokompim tersebut menjadi efektif dan menjamin keakuratan data. Berdasarkan hal tersebut, peneliti berniat untuk meneliti mengenai bagaimana efektivitas bagian Sekretariat Daerah Pemerintahan Kabupaten Badung yaitu bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Badung terkait dengan penyebaran informasi kegiatan pemerintahan di Kabupaten Badung dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas peran Humas di Prokompim Setda Badung. Hal inilah yang sebenarnya menjadi tolak ukur seberapa efektif pelaksanaan peran humas pemerintahan

dalam hal publikasi kegiatan pemerintah Kabupaten Badung dalam memberikan informasi kepada masyarakat, humas berusaha menyediakan informasi yang lengkap, dengan banyaknya proses dan melibatkan banyak pihak.

Kebijakan merupakan suatu rangkaian yang berkaitan dengan konsep dan asas dimana hal tersebut menjadi suatu pedoman serta dasar rencana dalam melakukan suatu perencanaan dan pelaksanaan dalam bekerja. Menurut Suharto (2010:7) "Kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu." Sehingga kebijakan merupakan suatu pemahaman terhadap pemerintah mengenai suatu tindakan yang dilakukan pemerintah dalam upaya mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Kebijakan tersebut berfungsi untuk mengatur serangkaian kehidupan dari masyarakat secara luas dalam suatu daerah. Sehingga pemahaman kebijakan inilah yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan suatu kebijakan public atau biasa disebut (*public policy*).

Menurut Wibawa dkk, (2006: 15) menyatakan "kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan." Sehingga dalam pelaksanaannya suatu kebijakan publik hendaknya tidak boleh bertentangan terhadap suatu nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat. Pada dasarnya kebijakan merupakan sarana pemecahan masalah dalam suatu masyarakat sehingga diharapkan tidak bertentangan dengan nilai yang berkembang dalam suatu masyarakat sehingga tidak terjadi suatu hambatan dalam pelaksanaan suatu kebijakan tersebut. Publikasi sebagai suatu tindakan dalam penerbitan yang mengacu pada suatu Salinan. Publikasi diartikan menurut Merriam merupakan suatu tindakan atau rancangan/desain produk yang menarik khalayak, seperti informasi yang memiliki nilai berita sehingga memiliki nilai tarik serta dukungan khalayak. Selain itu Nisberg mendefinisikan publikasi sebagai informasi yang dirancang untuk memperlihatkan, memperkenalkan, mempertahankan nama dan kehormatan seseorang, kelompok, atau suatu organisasi kepada khalayak dalam suatu konteks tertentu mulai media dengan tujuan untuk meniptakan suatu daya tarik. Penyampaian informasi melalui media komunikasi tersebut seperti halnya surat yang merupakan salah satu media informasi tertulis yang dipergunakan dalam suatu organisasi ataupun instansi. Menurut Suryani, surat merupakan secarik kertas atau lebih yang berisi percakapan (bahan komunikasi) yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain, baik atas nama pribadi maupun organisasi/lembaga/instansi.

Publikasi dalam instansi Pemerintah adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menjembatani antara kepentingan Pemerintah dengan kepentingan masyarakat. Publikasi dalam institusi pemerintah dibentuk untuk mempublikasikan kebijakan dan menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat serta mampu menyediakan sarana untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi. Ciri pemerintah yang baik adalah pemerintahan yang demokratis, pemerintahan demokratis yang sukses membutuhkan hubungan yang bertanggung jawab dengan masyarakat, didasarkan pada kepentingan bersama.

METODE

Penelitian ini menggunakan suatu pendekatan kualitatif yakni menggambarkan serta mendeskripsikan dari apa yang telah diamati yang dituangkan dalam kata-kata secara beruntut dan detail dimana penelitian ini berlokasi di Bagian Protokol dan Komunikasi Sekretariat Daerah Kabupaten Badung dengan menganalisis efektivitas humas dalam mempublikasikan kegiatan pimpinan daerah Kabupaten Badung. Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan suatu bahan primer, bahan sekunder, serta bahan tersier. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive sampling* yakni menggunakan informan yang menjadi pegawai di Bagian Protokol dan Komunikasi Sekretariat Daerah Kabupaten Badung. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui suatu observasi dan wawancara bertujuan untuk mendapatkan suatu hasil penelitian yang akurat. Dimana hasil dari penelitian tersebut nantinya dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif penyajian data, selanjutnya dilakukan suatu penarikan kesimpulan serta mengecek keabsahan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Peran Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Badung Terkait Mempublikasikan Kegiatan Pemerintahan di Kabupaten Badung

Pemerintahan Kabupaten Badung sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang pemerintahan tentunya dalam hal ini memiliki Humas sebagai jembatan pemerintah dengan masyarakat dalam hal kelangsungan jalannya pemerintahan Kabupaten Badung khususnya terhadap aspirasi masyarakat. Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Badung merupakan salah satu bagian dari pemerintahan Kabupaten Badung yang senantiasa memberikan pelayanan kepada publik, baik itu dari kalangan pers media massa lokal maupun luar Kabupaten Badung, komunitas dapat dikategori kedalam masing-masing profesi dan perhimpunan mahasiswa, masyarakat umum serta instansi-instansi yang berada dilingkungan pemerintahan Kabupaten Badung sebagian besar datang untuk memohon informasi.

Humas pemerintah Kabupaten Badung yang saat ini disebut sebagai Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan atau disingkat Prokopim sejatinya melakukan kegiatan dan program sesuai dengan visi dan misi Humas itu sendiri yaitu sebagai sarana informasi, penyusun kebijakan pemerintah dan pelayanan kepada publik. Efektivitas dari kegiatan dan program Humas tersebut dapat dilihat apabila semuanya sudah dilaksanakan dengan baik sebagaimana mestinya. Secara substansial, struktur organisasi Humas ditentukan dalam Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Sekretariat Daerah terbagi kedalam Kepala Bagian Humas sebagai pimpinan dalam kegiatan humas yang nantinya dibagi kedalam beberapa sub-bagian yaitu Sub-bagian Komunikasi dan Pelayanan Pers, Sub-bagian Dokumentasi dan Peliputan, dan Sub-bagian Pengumpulan Data dan Informasi, yang masing-masing sub-bagian tersebut memiliki tugas dan tanggungjawabnya masing-masing dalam pelaksanaan peran Humas pemerintah, yaitu seperti pengumpulan data, pengolahan data, sampai dengan publikasi data atau *output* data sebagai hasil dari tugas dan tanggungjawabnya.

Pelaksanaan peran bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kabupaten Badung dalam hal ini ditentukan berdasar atas Pasal 18 ayat (1) Peraturan Bupati Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Uraian Tugas Sekretariat Daerah, yang menentukan adanya beberapa tugas sebagai tanggungjawab bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kabupaten Badung, dan dalam Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Badung juga selanjutnya dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Asisten Administrasi Umum dalam struktural kepengurusan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung. sebenarnya keseluruhan tugas yang ditentukan oleh peraturan tersebut kepada bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Badung berjalan sebagaimana yang ditentukan. Kepala Bagian Humas Sekretariat daerah Kabupaten Badung, Made Suardita mengatakan bahwa terkait landasan dalam pelaksanaan tugas Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Badung ialah adanya suatu regulasi baru. Tugas pokok dan fungsi Protokol dan Komunikasi Pimpinan sebelumnya ialah bagian dari Humas pemerintah, namun pasca dikeluarkannya regulasi terbaru, maka menjadi tugas pokok dan fungsi dari Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Terkait dengan tugas pokok dan fungsi tersebut, sebenarnya dikhususkan pada komunikasi pimpinan ke publik yaitu dari Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah terkait dengan kinerja yang dilakukan kepada masyarakat, yang khususnya kepada masyarakat Kabupaten Badung. Tujuan tugas ini disebut oleh Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan agar informasi kinerja pimpinan pemerintah daerah yang nantinya mencapai suatu keberhasilan pemerintah daerah dapat tersebar luas di masyarakat, terutama masyarakat Kabupaten Badung.

Terkait dengan publikasi kegiatan pemerintah lainnya dilakukan oleh bagian komunikasi dan Informasi. Dalam publikasi kegiatan pimpinan di bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan terbagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu bagian pengumpulan data, pengolahan data, dan publikasi. Proses rilis tersebut terkait data foto, video dan rilis berita akan diolah oleh bagian pengolahan data dan nantinya akan dipublikasikan oleh bagian publikasi pada media cetak, media online dan media *live streaming* di sosial media dan youtube. Tujuan dilakukannya publikasi di berbagai media adalah agar informasi tersampaikan dengan cepat ke masyarakat dan kegiatan pimpinan menjadi viral postif.

Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Dari Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Badung Dalam Memplublikasikan Kegiatan Pemerintahan Di Kabupaten Badung

Sebagaimana dikemukakan oleh bahwa kinerja instansi ditentukan oleh kinerja pegawai dalam organisasi itu sendiri, untuk itu setiap organisasi akan berusaha meningkatkan kinerja pegawai yang merupakan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan (Harlie. M, 2012). Dalam meningkatkan kinerja, pegawai harus termotivasi untuk bekerja terlebih dahulu. Motivasi kerja adalah kekuatan atau dorongan yang ada pada diri pegawai untuk bertindak atau berperilaku dengan cara-cara tertentu. Kekuatan tersebut berupa adanya komunikasi untuk melakukan sesuatu atau sesuai dengan kemampuan individunya. Kepemimpinan merupakan hal yang penting dalam setiap organisasi, karena pemimpinlah yang menentukan berhasil tidaknya suatu organisasi

dan oleh karena itu instansi harus dapat mengoptimalkan kinerja pegawainya, maka kinerja instansi akan mencapai hasil yang memuaskan di instansi jika ada komunikasi yang baik, kepemimpinan yang efektif dan motivasi kerja yang baik juga. Dengan kinerja yang baik, instansi akan mampu bersaing di industri.

Kepemimpinan yang efektif harus memberikan arahan terhadap upaya seluruh pegawai dalam mencapai tujuan organisasi (Husaini & Sutarna, 2021). Tanpa kepemimpinan, hubungan antara tujuan individu dan tujuan organisasi mungkin tidak searah. Situasi ini menyebabkan situasi di mana individu bekerja untuk mencapai tujuan pribadi, sedangkan seluruh organisasi menjadi tidak efisien dalam mencapai organisasi. Sumber daya manusia dalam hal ini merupakan faktor sentral dalam instansi, sehingga dibutuhkan tenaga kerja yang terdidik dan siap pakai untuk menunjang perkembangan instansi. Sumber daya manusia sebagai potensi terbesar bagi suatu organisasi mau tidak mau bekerja dalam kelompok dengan karakteristik individu yang berbeda (Rahman, 2020). Oleh karena itu, dalam mengembangkan organisasi yang berbasis kerja sama atau kolektivitas kelompok diperlukan komunikasi yang jelas agar organisasi dapat berjalan secara efektif (Prasetyo & Anwar, 2021).

Sebelum melakukan kegiatan di lapangan bagian protokol terlebih dahulu berkomunikasi dengan kabag mengenai kegiatan apa yang akan di angkat dan apa saja yang mesti dipersiapkan oleh protokol. Peran protokol sangat berpengaruh terhadap kegiatan pimpinan. Dalam mewujudkan kegiatan tersebut, maka diperlukan strategi untuk mewujudkannya. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Komunikasi pada prinsipnya adalah aktivitas pertukaran ide atau kegiatan atau gagasan penyampaian ide atau pesan arti dari suatu pihak ke pihak lainnya dengan tujuan kesepakatan bersama terhadap ide atau pesan disampaikan tersebut (E. E. Lubis, 2012). Pegawai memegang peranan penting untuk menjalankan aktivitas dan pelaksanaan program kerja dalam melaksanakan tujuan dari suatu pemerintahan agar dapat mencapai yang dicitakan oleh organisasi pemerintahan. Sehingga upaya yang dapat dilakukan menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung sangat bergantung pada sumber daya manusia yang ada, dalam hal ini aparatur yang terdiri dari ASN serta pegawai kontrak. Pegawai pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan merupakan pegawai-pegawai yang berkecimpung di bidang keprotokolan dan komunikasi. Serta dalam hal ini diperlukan adanya peningkatan alat untuk menunjang kegiatan yang harus dilakukan dengan *live streaming*, seperti penambahan daya internet agar tidak terhalang oleh sinyal, ataupun penambahan alat untuk meliput kegiatan pimpinan yang harus dilakukan dengan live streaming demi menunjang optimalisasi dari kegiatan yang diliput.

SIMPULAN

Efektivitas peran Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Badung terkait mempublikasikan kegiatan pemerintahan di Kabupaten Badung yakni Keseluruhan tugas yang ditentukan oleh peraturan tersebut kepada bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Badung berjalan sebagaimana yang ditentukan. Dalam

publikasi kegiatan pimpinan di bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan terbagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu bagian pengumpulan data, pengolahan data, dan publikasi. Kinerja pegawai dalam melakukan tugas dan tanggungjawab dalam hal publikasi kegiatan pemerintah difokuskan pada kegiatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekda Kabupaten Badung. Upaya untuk mengatasi hambatan dari Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Badung dalam mempublikasikan kegiatan pemerintahan di Kabupaten Badung yakni kinerja instansi ditentukan oleh kinerja pegawai dalam organisasi, selain itu kemampuan komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan dalam organisasi karena pemimpinlah yang menentukan berhasil tidaknya suatu organisasi dan oleh karena itu instansi harus dapat mengoptimalkan kinerja pegawainya, maka kinerja instansi akan mencapai hasil yang memuaskan di instansi jika ada komunikasi yang baik, kepemimpinan yang efektif dan motivasi kerja yang baik juga, maka diperlukan strategi untuk mewujudkannya. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu, serta peningkatan sarana dan prasarana terhadap liputan yang harus dilakukan dengan live streaming.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Firman Ashaf, (2006.) Pola Relasi Media, Negara dan Masyarakat; Teori Strukturisasi Anthony Giddens sebagai Alternatif, *Jurnal Sosiohumaniora*: 8 (2)
- Adriani, F, Ratnamulyani, Ike Atikah & Agustini. (2017). Efektivitas Kegiatan Humas Pemerintah Kota Bogor dan Citra Humas Dimata Publik Eksternal *Jurnal Komunikatio*: 2(1)
- Ambasari, A., & Rina, R. (2022). Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara Pada Kantor Dinas Pertanian Di Kabupaten Mamasa. *Jurnal Online Manajemen ELPEI*, 18-3.
- Arif, M., & Saluy, A. B. (2020). Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus di Lingkungan Pemerintah Kecamatan Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur). *Jurnal Ilmiah Manajemen & Bisnis*, 4(1).
- Arifin, Ali Murtadha M, (2006). Sistem Informasi Pemerintahan pada Otonomi Daerah di Pemerintahan Kota Pekanbaru, *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Pembangunan*: 10 (1).
- Artana, I Wayan Arta. (2012). Pengaruh Kepemimpinan, Kompensasi, dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Studi Kasus di Maya Ubud Resort dan Spa. *Jurnal Manajemen, Strategi Bisnis, dan Kewirausahaan*, Vol. 2, No. 1.
- Bindarto, B. (2022). Pengaruh Kepemimpinan, Disiplin Kerja dan Motivasi terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara pada Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe. *Jurnal Ilmiah Dikdaya*, 12(1), 89-94.
- Caesarany, N., Roselina, D., & Vardy Karwur, G. (n.d.). Difusi Inovasi Humas Kementerian Sosial Republik Indonesia Dalam Menyebarkan Inovasi Program E-Warong, *Jurnal Communicology*: 7(2).

- Damayanti, Novita dan Cakra Ningsih. (2020). Digital Humas Pemerintah Dalam Menyampaikan Informasi Edukasi Pencegahan Covid-19 di Indonesia, *Jurnal Pustaka Komunikasi*: 3(2).
- Dewi, E. A., Tulhusnah, L., & Soeliha, S. (2022). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara (Asn) Melalui Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening Pada Bappeda Kabupaten Situbondo. *Jurnal Mahasiswa Entrepreneurship (JME)*, 1(5), 930-944.
- Djalante, A. (2022). Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi, Loyalitas Kerja, Kompetensi Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 4(3), 313-323.
- Djalante, A., Razak, M., & Muliana, M. (2022). Pengaruh Kepemimpinan Transformasional, Budaya Kerja, dan Disiplin Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Mirai Management*, 7(1), 372-379.
- Firdaus, A., Disman, D., & Masruroh, R. (2022). Efek Moderasi Motivasi Kerja Pada Pengaruh Kompetensi Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan. *Indonesian Journal of Strategic Management*, 5(1).
- Gusti, Messa Media. (2012). Pengaruh Kedisiplinan, Motivasi Kerja, Dan Persepsi Guru Tentang Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru Smkn 1 Purworejo Pasca Sertifikasi. *Universitas Negeri Yogyakarta*, 3(1).
- Peraturan Bupati Badung Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Uraian Tugas Sekretariat Daerah
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara